

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAERAH
UNTUK PENILAIAN KINERJA
(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Padang)**



Oleh:
MERY NELHIDA
(04 153 009)

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia pada tahun 1997 telah memhuat perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Krisis tersebut dimulai dari melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika. Krisis ini mengakibatkan ribuan bahkan jutaan rakyat Indonesia kehilangan pekerjaan. Tingkat inflasi dan harga sembako (sembilan bahan pokok) membumbung tinggi dan telah memberikan beban tambahan yang semakin memberatkan rakyat. Sementara itu produksi nasional dan kegiatan bisnis merosot tajam karena sulitnya aspek pendanaan usaha serta tingginya tingkat suku bunga perbankan. Untuk mencegah terulang lagi krisis ekonomi, Indonesia memerlukan suatu profesionalisme dalam mengelola keuangannya agar lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semenjak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaan. Perubahan yang terjadi baik positif maupun negatif mengharuskan semua pihak melakukan *adjustment*. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasinya secara bebas dan merdeka. Salah satu aspirasi yang berkembang adalah perbaikan terhadap pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah.

Berbagai aspirasi itu ada yang ditindak lanjuti pemerintah dengan cepat dan ada juga yang diwujudkan secara bertahap. Upaya awal dalam memenuhi aspirasi masyarakat

akan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Otonomi Daerah) dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU No. 22 Tahun 1999 ini memberikan wewenang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengurus dan mengelola daerahnya sesuai potensi dan karakteristik masing-masing. Sedangkan UU No. 25 tahun 1999 menyebabkan pola baru dalam hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Sebagai konsekuensi dari otonomi daerah tersebut, maka hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (termasuk hubungan dalam bidang keuangan) menjadi sesuatu yang wajib pula diubah. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat dengan berubahnya sistem anggaran tradisional menjadi sistem anggaran berbasis kinerja, dari sistem akuntansi vertikal menjadi sistem akuntansi horizontal, dari sistem akuntansi *single entry* menjadi sistem akuntansi *double entry* dan menuju *accrual basis* serta modernisasi dalam sistem manajemen publik dan pemerintahan yang lebih menekankan pada prinsip kinerja, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value for money*) misalnya dengan mulai diadopsinya sebagian konsep *New Public Management* dan *Reinventing Government*.

Pemerintah telah mengeluarkan serangkaian perangkat peraturan pendukung pelaksanaan otonomi diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah ini menginstruksikan pemerintah daerah agar segera menyusun dan menerapkan sistem akuntansi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangannya. Pemerintah juga

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan pembahasan perhitungan rasio laporan keuangan Pemerintah Kota Padang untuk tahun 2005 & 2006 antara lain:

1. Penyusunan laporan keuangan untuk tahun 2005 masih berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi keuangan yang lazim yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi & pinjaman, serta pemerintah. Sedangkan penyusunan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2006 telah mengacu pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Secara umum terdapat dua kendala yang ditemui Pemerintah Kota Padang dalam penyusunan laporan keuangan daerah antara lain kurangnya sosialisasi terhadap implementasi dalam penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta terjadinya perubahan peraturan yang dinamis. Disamping itu, banyaknya SDM di unit-unit pengelola keuangan yang tidak memiliki latar belakang akademis yang memadai di bidang akuntansi keuangan

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Ibrahim. 2002. *Pelatihan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Moores Rowland Indonesia.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2007. *Padang dalam Angka 2006*. Padang: BPS Kota Padang dan Bappeda Kota Padang.
- Djayasinga, Marselina. 2007. *Riset Anggaran untuk Rakyat (Studi Kasus: APBD Kota Bandar Lampung*. Vol 12/146 (www.google.com, diakses tanggal 18 juni 2008).
- Hanafti, Mamduh dan Abdul Halim. 1996. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP-YKPN.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- IFAC. 2000. *Governmental Financial Reporting: Accounting Issues and Practices*.
- Kiprapapua. 2007. *Analisis APBD Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2006*. Vol 7/1 (www.google.com, diakses tanggal 18 juni 2008).
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Prastowo, DWi. 1995. *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan AMP-YKPN.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Wild, John j, Subramanyam R, Halsey, Robert Halsey. 2005. *Analisis Laporan Keuangan Edisi ke 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia dan Synergy Communication 2002. *The Essence Of Good Corporate Governance*. Jakarta: YTTMI Institute.